

Penerapan Kualitas Pelayanan *E-Filing* Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT-Tahunan (Studi Kasus KPP Pratama Cileungsi)

Grace Daniel Mulia¹⁾, Komang Adi Sastra Wijaya²⁾, Putu Nomy Yasintha³⁾

¹⁾²⁾³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: danielmulia77@gmail.com¹⁾, putu_nomy@unud.ac.id²⁾,
adisastrawijaya@fisip.unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

KPP Pratama Cileungsi is responsible for interacting and assisting taxpayers in E-filing their annual tax returns through electronic filing. E-Filing is established by the Decree of the Directorate General for Taxes No. Kep-88/PJ/2004, established by the Directorate General for Taxes No. Kep-88/PJ/2004. It's one of the services we offer. File electronic tax returns for taxpayers online in real time. Time via the Internet and the DGT website or through a provider of tax filing services designated by the DGT. This study aims to analyze the application of the quality of electronic filing services provided by KPP Pratama Cileungsi to taxpayers when submitting annual SPTs. This analysis references Parasuraman and Berry's (2011) five indicators expressed through their theory. The five metrics are Tangibles, Realibility, Responsiveness, Assurance, and Empathy. As a result of this discovery, KPP Pratama Cileungsi still has some indicators flawed when implementing the electronic filing service.

Keywords : service quality, E-Filing, KPP Pratama Cileungsi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2009, pajak memiliki pengertian sebagai iuran yang diharuskan oleh seseorang atau badan yang beresifat paksaan kepada negara berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan, secara tidak langsung diterima oleh seseorang atau badan tersebut dan iuran tersebut ditujukan untuk semua kepentingan negara demi kemakmuran rakyat sendiri.

Setiap pemungutan pajak, wajib pajak mematuhi pembayaran pajak tahunan. Ketaatan wajib pajak dalam membayar pajaknya merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai penerimaan pajak sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan

dan dipahami sebagai sebuah tindakan ketaatan atau rasa tertib dalam pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Indonesia sendiri menerapkan *Self Assessment System*, yang dimana wajib pajak membayarkan pajaknya seorang diri dan diharuskan aktif dalam menyelesaikan pajak pribadinya dan berguna untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak itu sendiri. Namun *Self Assessment System* ini memiliki hambatan seperti keterlambatan dan ketidakpastian wajib pajak saat melaporkan pajaknya atau surat pemberitahuan tahunan (SPT) mereka.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat program baru guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memaksimalkan pelayanan mereka yang memiliki tujuan dalam hal meningkatkan ketaatan wajib pajak saat

melaporkan pajaknya. Program baru tersebut diluncurkan pada Mei 2004 yang sudah ditetapkan pada Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 dan dinamakan *E-Filing*.

E-Filing sendiri merupakan program yang dibuat oleh DJP sebagai bentuk layanan mereka kepada wajib pajak yang dimana penyampaian atau pelaporan SPT milik wajib pajak dapat dilakukan melalui *online* dengan mengakses internet dan *website* milik Direktorat Jendral Pajak.

Dengan adanya *E-Filing*, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya wasih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keterangan yang telah dikemukakan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Kementerian Keuangan Indonesia menjelaskan mengenai penerimaan pajak pada tahun 2021 bulan Januari. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan, pada Januari 2021 terdapat deficit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 0,26% senilai Rp25,7 triliun dari PDB. Lalu Komisi Pemberantas Korupsi memberikan catatan merah kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, karena rata-rata skor *Monitoring Center of Prevention* (MCP) pada tahun 2020 turun 14 poin dari skor rata-rata MCP pada tahun 2019.

Penerimaan Pemerintahan Kabupaten Bogor dari tahun 2016 hingga 2020, sumber pendapatan daerah tertinggi adalah pajak daerah. Pada tahun 2016 sampai 2019, pajak daerah yang diterima mengalami kenaikan. Namun tahun 2020 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019 pada pajak daerah.

Salah satu hal yang menyebabkan pendapatan hasil daerah mengalami penurunan adalah penilaian wajib pajak

terhadap pelayanan yang diberikan KPP Pratama Cileungsi kepada wajib pajak. Kualitas Pelayanan menjadi penentu atas keberhasilan *E-Filing* kepada kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT-Tahunan. Jadi penulis memberikan judul “Penerapan Kualitas Pelayanan *E-Filing* Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT-Tahunan dengan studi kasus KPP Pratama Cileungsi.”

2. Kajian Pustaka

Penelitian ini, penulis menggunakan teori Parasuraman dan Berry (2011) untuk menganalisa penerapan kualitas pelayanan *E-Filing* dari KPP Pratama Cileungsi. Teori ini mempunyai 5 indikator dalam menilai baiknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau wajib pajak. Lima indikator tersebut meliputi :

1. *Tangibles* (Bukti Langsung)

Kualitas pelayanan dalam indikator ini berupa sarana dan prasarana. Pada indikator ini konsumen menilai kualitas yang diberikan baik atau tidak.

2. *Reliability* (Kehandalan)

Kehandalan merupakan kemampuan dari pemberi layanan dalam memberikan sebuah layanan yang sudah dijanjikan secara akurat, terpercaya dan rasa aman, contohnya seperti ketepatan waktu dalam memberi pelayanan dan juga ketelitian dalam memberikan penyelesaian pelayanan.

3. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Responsiveness merupakan kesiapan petugas dalam membantu dan juga menyediakan pelayanan secara tanggap. Tanggap yang dimaksud disini yaitu respon penyedia layanan dalam memberikan

pelayanan itu haruslah secara cepat sesuai harapan masyarakat.

4. *Assurance* (jaminan)

Assurance (Jaminan) merupakan pelayanan yang meliputi pengetahuan, keramahan, keamanan yang nantinya akan menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri pelanggan.

5. *Empaty* (empati),

Kualitas layanan dilihat dari indikator *Empathy* (Empati) memiliki pengertian dengan melakukan pelayanan kepada konsumen dengan penuh perhatian dan khusus kepada individu yang akan didapatkan pelanggan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dan unit analisisnya ialah KPP Pratama Cileungsi.

Teknik penentuan informan penelitian ini ialah purposive sampling yang meliputi Kepala KPP Pratama Cileungsi, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan, dan wajib pajak yang sudah masuk dalam wilayah KPP Pratama Cileungsi. Namun penulis memiliki halangan dalam penentuan informan yang dimana hanya membolehkan satu narasumber dari pihak KPP Pratama Cileungsi yaitu Kepala Pelayanan KPP Pratama Cileungsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Temuan

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Parasuraman dan Berry

(2011) ditinjau melalui 5 indikator sebagai berikut:

1. *Tangibles* (Bukti Fisik)

Upaya dalam memberikan pelayanan yang baik oleh pemberi pelayanan haruslah didukung dengan sarana dan prasarana baik. Sarana dan prasarana berpengaruh pada persepsi pelanggan sendiri. Indikator ini juga merupakan hal penting dalam menilai kualitas pelayanan. Sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas mempengaruhi penilaian pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada mereka. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ruang tunggu yang tertata rapi, lingkungan yang bersih, ruang pendaftaran dan informasi yang efektif dan efisien.

KPP Pratama Cileungsi memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan dijaga kualitasnya. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPP Pratama Cileungsi dalam memberikan pelayanannya terhadap wajib pajak adalah terdapat parkir motor dan mobil yang terpisah, ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang informasi, toilet, ruang laktasi, ruang bermain anak, komputer, dan kecepatan internet yang memadai.

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPP Pratama Cileungsi sudah lengkap dan tertata dengan baik. Ruang tunggu yang sudah tersusun rapih dan bersih, ruang pendaftaran dan informasi yang efektif dan efisien, tempat parkir yang memisahkan kendaraan pengunjung pegawai dan juga KPP Pratama Cileungsi memisahkan antara motor dengan mobil, toilet yang bersih, dan terdapat ruang tambahan yang diberikan oleh KPP Pratama Cileungsi yaitu ruang laktasi dan

ruang bermain anak. Alat elektronik yang digunakan untuk melayani wajib pajak sudah memadai, kecepatan internet untuk melayani wajib pajak secara online sudah baik, dan peralatan seperti komputer sudah memadai.

Pada indikator *Tangibles* (Bentuk Fisik) dapat dikatakan baik dan juga memuaskan, hal ini terbukti dari respon positif masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPP Pratama Cileungsi, seperti ruang tunggu yang tertata rapi, lingkungan yang bersih, adanya helpdesk, dan lapangan parkir yang memadai. Semua sarana dan prasarana itu sudah memuaskan di mata masyarakat yang merasakan.

2. *Reliability* (Kehandalan)

Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas dalam melaksanakan suatu pelayanan sehingga tingginya kebutuhan masyarakat akan sebuah pelayanan haruslah diimbangi dengan pelayanan maksimal yang akan menuntun penyedia layanan itu untuk lebih cekatan dalam memberikan pelayanan. Kehandalan merupakan kemampuan dari pemberi layanan dalam memberikan pelayanan yang sudah dijanjikan secara tepat, terpercaya dan rasa aman, contohnya seperti ketepatan waktu dalam memberi pelayanan, ketelitian dalam memberikan penyelesaian pelayanan, dan memberikan rasa aman kepada pelanggan.

Kehandalan dan profesionalisme dari pemberi layanan sangat penting agar dapat memberikan layanan secara tepat dan terpercaya. Kemampuan dari pemberi layanan dalam memberikan pelayanan secara tepat dan terpercaya adalah hal penting yang dimiliki oleh penyedia layanan. KPP Cileungsi sebagai penyedia layanan haruslah memiliki pelayanan

yang akurat dan terpercaya agar wajib pajak sebagai penerima layanan merasa nyaman akan pelayanan yang diberikan.

Dilihat dari indikator *Reliability* (Kehandalan) terbilang cukup baik oleh wajib pajak, namun terdapat kekurangan pada indikator ini. Kemampuan dari petugas KPP Cileungsi dalam menangani setiap keluhan-keluhan mereka dalam melaporkan SPT-Tahunannya dikarenakan juga sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Pelayanan KPP Cileungsi bahwa semua petugas dalam bidang pelayanan sudah mengerti dan tanggung jawab mereka masing - masing dalam tugas yang diberikannya. Sosialisasi yang dilakukan secara online melalui media sosial sudah baik, namun untuk sosialisasi secara langsung ke desa - desa, para wajib pajak tidak mendapatkan informasi mengenai sosialisasi secara langsung.

Kesimpulannya bahwa kualitas pelayanan *E-Filing* di KPP Pratama Cileungsi yang dilihat dari *Reliability* (Kehandalan) sudah cukup baik, namun KPP Pratama Cileungsi masih mengalami kekurangan dalam informasi sosialisasi secara langsung ke desa - desa. Hal ini mengakibatkan wajib pajak di desa yang kurang pengetahuannya dalam bidang elektronik kurang mengetahui pengertian dan langkah - langkah dalam menggunakan *E - Filing*.

3. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Pengertian pada indikator ini adalah kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan secara tanggap. Tanggap yang dimaksud disini yaitu respon penyedia layanan dalam memberikan pelayanan itu haruslah secara cepat sesuai harapan masyarakat. Pelayanan yang cepat yang diberikan

penyedia layanan merupakan sikap tanggap oleh penyedia layanan yang diharapkan oleh masyarakat dan hal itu yang membuat suatu pelayanan dapat dikatakan berkualitas.

Pada indikator *Responsiveness* (Daya Tanggap) masih merasa kurang puas atas daya tanggap ataupun respon yang diberikan secara online dalam memberikan pelayanan. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan dirasa masih kurang cepat oleh masyarakat. Secara *offline* atau langsung, respon yang diberikan oleh petugas sangat cepat, petugas langsung menanyakan keluhan kita dan diarahkan sesuai dengan keinginan kita, namun pelayanan yang diberikan petugas secara *online* melalui nomor *WhatsApp* responnya masih kurang. Respon yang diberikan masih relatif lambat, yang dimana menurut pengalaman wajib pajak, wajib pajak baru direspon oleh petugas pelayanan sekitar 3 hari.

Kesimpulannya adalah kualitas pelayanan KPP Pratama Cileungsi yang diamati melalui indikator *Responsiveness* (Daya Tanggap) belum cukup baik. Hal ini terjadi dikarenakan respon *online* yang kurang cepat dari petugas KPP Pratama Cileungsi. Alasan atas respon lambat yang diberikan adalah banyaknya wajib pajak yang membutuhkan pelayanan di waktu yang bersamaan. Dengan membuat wajib pajak menunggu lama, hal itu membentuk persepsi masyarakat kurang baik, dimana respon yang diberikan petugas KPP Pratama Cileungsi kurang cepat.

4. Assurance (Jaminan)

Assurance (Jaminan) merupakan pelayanan yang meliputi pengetahuan, keramahan, keamanan yang nantinya akan

menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri pelanggan. Dengan adanya jaminan dari suatu instansi atau perusahaan, hal ini akan menumbuhkan rasa aman dalam diri pelanggan dan tak akan ragu untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan dari instansi atau perusahaan, lalu jaminan juga akan sangat berpengaruh pada kepuasan dari pelanggan dikarenakan apa yang diharapkan pelanggan sesuai dengan yang disediakan oleh instansi ataupun perusahaan yaitu pengetahuan dari pemberi layanan, keramahan yang didapatkan dari pemberi layanan, dan juga keamanan.

Pentingnya jaminan dalam melaksanakan pelayanan yang mempengaruhi kualitas dari pelayanan tersebut, oleh karena itu KPP Pratama Cileungsi harus memperhatikan cara dalam memberikan pelayanan yang akan menumbuhkan rasa kepercayaan dalam diri masyarakat.

KPP Pratama Cileungsi memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan cepat agar wajib pajak percaya kepada mereka. Petugas di KPP Pratama Cileungsi juga memberikan pelayanan yang ramah kepada wajib pajak. Keamanan di lingkungan KPP Pratama Cileungsi sangat terjamin dikarenakan terdapat petugas keamanan yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta ditempatkan di berbagai titik penting di lingkungan KPP Pratama Cileungsi. Keamanan datanya pun terjamin, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan pihak KPP Pratama Cileungsi bahwa data pribadi tidak dikelola sendiri oleh KPP Pratama Cileungsi, namun dikelola oleh Kantor Pusat DJP yang sudah memiliki *cyber security* yang baik.

Pernyataan yang diberikan oleh pihak KPP Pratama Cileungsi mengenai keamanan lingkungan dan keamanan data pribadi wajib pajak sama seperti pernyataan yang diberikan oleh wajib pajak. Menurut wajib pajak, pegawai KPP Pratama Cileungsi sopan dan ramah, serta keamanan di KPP Pratama Cileungsi sangat terjamin, baik dari sisi keamanan diri di lokasi maupun keamanan data – data pribadi yang terdaftar di *E-Filing*. KPP Pratama Cileungsi sendiri sudah memiliki SOP untuk melakukan pelayanan.

5. *Empaty* (Empati)

Kualitas layanan dilihat dari dimensi *Empathy* (Empati) memiliki pengertian dalam hal memberikan pelayanan dengan penuh perhatian dan khusus kepada individu yang akan didapatkan pelanggan. Sebagai suatu instansi ataupun perusahaan yang menyediakan pelayanan haruslah selalu bersedia membantu setiap kebutuhan masyarakat. Adanya kepedulian dari pegawai dalam selalu memperhatikan kebutuhan menjadi unsur penting terciptanya kualitas pelayanan. Lalu dengan adanya perhatian secara khusus akan mempengaruhi kepuasan dari pelanggan itu sendiri, hal ini dikarenakan pelanggan akan merasa diutamakan oleh instansi ataupun perusahaan terkait dengan apa yang dibutuhkannya dan juga dikeluhkannya.

KPP Cileungsi dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap wajib pajak dengan memberikan nomor WhatsApp agar mempermudah wajib pajak jika mengalami kesulitan, wajib pajak dapat menanyakannya lewat WhatsApp. Menurut wajib pajak sendiri, empati dan kepedulian yang berikan KPP Pratama Cileungsi sudah baik, dikarenakan

nomor WhatsApp yang mempermudah wajib pajak jika mengalami kesulitan E-Filing dan secara langsung juga pegawai langsung membantu wajib pajak menangani kesulitannya. Namun terdapat kekurangannya yaitu pada bagian respon yang diberikan kepada wajib pajak melalui *online* pada *WhatsApp* kurang cepat. Respon yang diberikan petugas kurang cepat telah dijelaskan di indikator *Responsiveness* (Daya Tanggap).

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan juga analisa yang telah peneliti kumpulkan dan diolah sedemikian rupa, maka dihasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan KPP Pratama Cileungsi. Berikut adalah rekomendasinya antara lain:

1. Penambahan sumber daya manusia dibagian pelayanan online. Penambahan ini berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam indikator Daya Tanggap, dimana dengan bertambahnya sumber daya manusia di KPP Pratama Cileungsi dapat mempercepat respon terhadap banyaknya pengaduan wajib pajak. Banyaknya pengaduan yang membuat respon yang diberikan juga menjadi lambat dan KPP Pratama Cileungsi membutuhkan penambahan sumber daya manusia. Pengaduan-pengaduan ini biasanya bersangkutan dengan kendala-kendala yang dialami wajib pajak terhadap *E-Filing*.
2. Perlu adanya pembuatan forum untuk wajib pajak yang memiliki kendala pada saat

menggunakan *E-Filing*. Forum ini bertujuan untuk mengurangi pertanyaan berulang dari wajib pajak yang memiliki permasalahan serupa. Forum yang dimaksud adalah forum diskusi yang dilakukan melalui website. Dilakukan forum setiap berapa bulan sekali, lalu forum tersebut di simpan dan dibagikan ke media sosial milik KPP Pratama Cileungsi. Jika kemudian hari terdapat pertanyaan yang sama, petugas hanya memberikan hasil dari forum yang sudah dilaksanakan. Misalnya ada permasalahan nomor EFIN yang tidak keluar, pihak KPP Pratama Cileungsi hanya perlu menjawab satu kali untuk permasalahan tersebut dan setelahnya jika terdapat wajib pajak yang memiliki permasalahan serupa, dapat merujuk pada jawaban dari pertanyaan yang sudah pernah diajukan sebelumnya di forum tersebut.

3. Perlu adanya penambahan jadwal KPP Pratama Cileungsi mengenai sosialisasi secara langsung ke desa – desa. Pertambahan jadwal ini dapat dilakukan sebulan sekali untuk sosialisasi secara langsung ke desa – desa terpencil yang kurang mengetahui teknologi. Sosialisasi secara langsung ini juga berguna untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak yang kurang memahami teknologi dan dapat meningkatkan kualitas wajib pajak yang menggunakan *E-Filing* dan tidak harus ke KPP Pratama Cileungsi untuk menyampaikan SPT-Tahunannya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disampaikan maka penerapan

pelayanan *E-Filing* wajib pajak dalam penyampaian SPT-Tahunan dengan studi kasus KPP Pratama Cileungsi dapat dikatakan cukup baik, namun terdapat beberapa kekurangan dalam melakukan pelayanannya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa indikator kualitas pelayanan berdasarkan teori kualitas pelayanan menurut (Pasuruman dan Berry, 2011) terdapat permasalahan.

Saran

Saran yang penulis berikan pada penelitian ini adalah:

1. Penambahan sumber daya manusia di KPP Pratama Cileungsi pada bagian pelayanan online.
2. Pembuatan forum untuk wajib pajak yang mengalami kendala dalam menggunakan *E-Filing*.
3. Pembahasan jadwal khusus untuk sosialisasi secara langsung ke desa–desa terpencil yang kurang mengetahui teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Suandy, Erly (2016). Hukum Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sumber Jurnal/Karya Ilmiah

Firdaus, Afif. 2019. "PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)". Surabaya: Universitas Airlangga.

Juwita, N. M. R., Supriyanti, W., & Yasintha, N. (2011). Kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pada kantor camat abang kabupaten karangasem.

Lubis, Henny. 2019. "Effect of E-Filling System Implementation And Taxpayer Knowledge In Using E-Filling On Individual Taxpayer Compliance". Journal of International Conference Proceeding. Vol.02/03.

Mahayoni, G. A. D. I., & Wirantari, I. D. A. P. (2021). Pengembangan Website Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Bona, Gianyar. Journal of Contemporary Public Administration (JCPA), 1(1), 13-19.

Wijaya, K. A. S., & Noak, P. A. (2019). Internalisasi Etika Birokrasi dan Penguatan Sistem Pengendalian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mencegah Korupsi. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 1(1), 46.

Sumber Online

Merdeka.com. 2020. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap

dengan Jenis-Jenisnya. Diakses pada link: <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html?page=2> pada tanggal 14 Agustus 2021.

Kompas.com. 2021. Penerimaan Pajak Minus 15,3 Persen di Januari 2021, Ini Sebabnya. Diakses pada link: <https://money.kompas.com/read/2021/02/23/161955726/penerimaan-pajak-minus-153-persen-di-januari-2021-ini-sebabnya?page=all> pada tanggal 14 Agustus 2021.

CNN Indonesia. 2021. Penerimaan Pajak Anjlok Hanya Rp68,5 T per Januari 2021. Diakses melalui link: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223181251-532-610010/penerimaan-pajak-anjlok-hanya-rp685-t-per-januari-2021> pada tanggal 14 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Direktorat Jenderal Pajak. 2004. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 88/PJ/2004 tentang "Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik", Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi